

Analisis Sitem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi

Marsela Marsela

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Acep Suherman

Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Korespondensi Penulis: marsela.1930611141@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out how the Analysis of Internal Control System in the Treasury of the Regional Developmen Planning, Research and Developmen Agency (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi. This research focuses on the internal control system for cash because there is often misuse of agency assets. Therefore researchers are interested in conducting research on Intrenal Control System Analysis on Cash. The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used in this study is by: (1) Collecting data to obtain the desired information. (2) Reducing data or summarizing the main things. (3) Presenting data to draw conclusions. (4) Summing up the results of the research The results of the research show Research and Development Agency (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi is good and is in accordance with the system contained in PP No. 60 of 2008.*

Keywords: *Internal Control System, Cash, Regional Research and Development Planning Agency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi. Penelitian ini berfokus pada Sistem Pengendalian Internal Pada Kas karena sering terjadi penyalahgunaan harta kekayaan instansi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Kas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan: (1) Mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. (2) Mereduksi data atau merangkum hal-hal yang pokok. (3) Menyajikan data untuk memperoleh kesimpulan. (4) Menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab. Sukabumi sudah baik dan sudah sesuai dengan sistem yang terdapat pada PP No.60 Tahun 2008.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Kas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

PENDAHULUAN

Masa covid 19 telah berakhir seluruh masyarakat dituntut harus waspada tentang wabah tersebut, covid 19 memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga akuntansi berperan sebagai alat untuk memudahkan komunikasi informasi yang mencakup transaksi keuangan jadi semakin luas. Permasalahan yang sering dilalui oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas sebuah instansi baik swasta atau pemerintahan jadi semakin kompleks serta makin sulit jika dikerjakan sendirian. Sebagian contoh masalah yang sering dihadapi setiap instansi pemerintah yaitu bagaimana pengelolaan kas yang aman. Menurut Puraji (2017:8) dalam kutipan Annisa Yuslikha 2020) Kas yaitu gambaran aktiva paling likuid, sebagai alat transaksi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan umum perusahaan, serta bisa digunakan segera untuk membiayai kegiatan entitas.

Adanya kebutuhan kas dan pengelolanya, agar instansi atau organisasi tidak kehabisan uang kas untuk menutupi berbagai kebutuhan belanja daerah. Kurangnya kas untuk memenuhi kewajiban akan menyebabkan instansi/lembaga hilang kepercayaan. Jika memiliki kelebihan uang kas, usahakan mengelolanya dengan baik dan jangan sampai uang kas dibiarkan begitu saja. Pemasukan dan pembayaran kas dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sistem Pengendalian internal (SPI) di lingkungan pemerintah dapat dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dimana kas dapat dilaporkan secara andal, aktiva dapat dikelola dengan aman dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI dalam penerapan harus senantiasa memperhatikan ukuran, kompleksitas dan sifat dari fungsi instansi pemerintah (Penjelasan umum PP No 60 Tahun 2008).

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Sistem pengendalian internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadilan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 1 ayat 2 yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Sistem Pengendalian Internal (SIP) dapat dilihat dari bagian keuangan yang mengatur masuknya kas daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi yaitu: suatu instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan, pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam melaksanakan kegiatan instansi ini memerlukan suatu perencanaan kas yang efektif dan efisiensi. Dengan berperannya kas dalam kegiatan daerah, maka suatu daerah harus memastikan bahwa apakah penerimaan kas sudah berjalan dengan baik. Penulis akan membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Kas. Alasannya untuk menghindari penyalahgunaan kas terhadap manajemen, mencerminkan dari transaksi keuangan, melindungi kas daerah dan untuk mendukung produktivitas daerah untuk

mengetahui seberapa besar penerapan pengendalian internal pendapatan daerah mulai awal penerimaan sampai pengeluaran kas menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penggelapan, dan pemborosan terhadap harta kekayaan daerah, atau penerapan lain yang dapat merugikan suatu daerah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang 3 unsur sistem pengendalian intern pemerintah, salah satunya adalah desentralisasi dan pemisahan tugas yang baik. Namun penulis melihat permasalahan di Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melalui informasi dari pegawai yang ada di Bappelitbangda yaitu tidak terdapat pemisahan penerimaan kas. Hal ini melanggar unsur pengendalian internal yaitu adanya pemisahan fungsi penerimaan kas dengan fungsi pengeluaran kas.

Fenomena pengaduan yang terjadi dari pihak pegawai terhadap instansi seperti keluhan dalam pengelolaan kas, yaitu instansi kurang melakukan pelatihan serta bimbingan khusus terhadap pegawai, sehingga menimbulkan tidak terlindunginya sistem pengendalian internal pada kas. Dan setiap para pegawai yang bertugas sebagai bagian dari manajemen agar mereka lebih memahami hal-hal terkait wewenang dan fungsi (job description) dalam diri mereka sendiri, sehingga tidak akan terjadinya double job. Seperti bagian fungsi penerimaan kas harus terpisah dari bagian fungsi pengeluaran kas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyelewengan lainnya yang dapat dihindari oleh pihak manajemen suatu organisasi.

Sistem pengendalian internal kas bappelitbangda sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam pemisahan penerimaan kas. Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh dari salah satu pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. Berbagai permasalahan yang terjadi merupakan persoalan yang harus di selesaikan segera dan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab. Sukabumi. Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, dituntut untuk meningkatkan kinerja pegawai yang ada dalam instansi pemerintah. Terutama dalam Penerimaan kas. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan harta kekayaan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan ilmu

akuntansi khususnya di pemerintah daerah, memberikan sumber bahan kajian dan bacaan dalam pengembangan bagi pembaca yang berhubungan dengan pengendalian internal kas, agar ilmu yang dikembangkan bisa dengan mudah dipahami dan di aplikasikan secara efektif dan efisiensi, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal kas serta dapat mengembangkannya ke dalam faktor lain yang

berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai akuntansi pemerintah, khususnya mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah serta sistem pengendalian internal kas.

KERANGKA TEORI

Pengendalian Internal

Menurut Zabihalloah dalam kutipan Nisrina Atikah (2018:22) sebagai besar dalam penelitian kontrol internal yang digunakan atau dilaporkan mengacu pada *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission* (COSO) tentang kerangka kerja pengendal internal yang terintegrasi. Laporan ini memberikan informasi pentingnya pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas serta memberikan dorongan bagi entitas untuk memfokuskan kembali perhatian pada sistem pengendalian internal mereka dalam upaya untuk memastikan proses pelaporan keuangan yang andal. Oleh karena itu, laporan COSO merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi pengendalian intenal yang efektif dan efisien.

Pengertian Pengendalian Internal

Coso (2018) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen serta seluruh staf dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian. Adapun tujuan dari pengendalian itu, yaitu diantaranya Efektifitas dan efisiensi operasional, Reliabilitas pelaporan keuangan, Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

Menurut Herry (2018) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan peraturan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksud meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut mulyadi (2017:130) unsur pokok pengendalian internal adalah

- a. Stuktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Harus di pisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Formular merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formular harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di lain pihak, formular merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi.

Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formular dicatat dalam akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi. Oleh karena itu sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat diperoleh bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.

c. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah

ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika di ciptakan cara -cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:

1. Penggunaan formular bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Karena formular merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya transaksi.

2. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
 4. Perputaran jawabat (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
 5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara oleh jabatan lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.
 6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodic harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintah telah melakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk mampu mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, pemimpin instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai

bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Bambang (2018:14) Sistem Pengendalian Internal dapat memiliki beberapa pengertian diantaranya: sistem pengendalian internal dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan penelitian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti dalam mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus. Sedangkan dalam arti luas, Sistem Pengendalian Internal dapat dipandang sebagai sistem yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: Melindungi harta, Menjamin terhadap “terjadinya utang yang tidak layak”, Menjamin ketelitian dan dipercayainnya data akuntansi, Dapat diperolehnya operasi secara efisien, dan Menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang di terapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya yaitu:

- a. Menjaga aktiva perusahaan;
- b. Memastikan akuntansi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi;
- c. Mendorong efisiensi dalam operasi perusahaan; dan
- d. Mengukur dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Pengertian Kas

Theodorus M. Tuanokotta. (2020) mengatakan bahwa kas dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai uang tunai. Namun dalam pengertian akuntansi kas mengandung istilah pengertian yang lebih luas yang menunjukkan uang dan alat pembayaran lainnya yang dapat dicairkan setiap saat, serti cek atau money order yang secara normal dapat diterima sebagai alat pembayaran dan dapat disimpan di Bank.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Kas

Sistem pengendalian internal terhadap kas merupakan semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, menjamin ketelitian, mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen kas.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Kas

Sistem pengendalian internal kas bertujuan untuk:

- a. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas
- b. Membuktikan kewajaran uang kas yang dicantumkan dalam neraca
- c. Membuktikan kewajaran penyajian pengungkapan uang kas dineraca
- d. Memperkecil kemungkinan penyelewengan atas manipulasi terhadap kas sehingga tetap dalam keadaan seimbang dan data keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya
- e. Dengan adanya fungsi pemisahan tugas antara kas dengan yang memegang kas, maka pencatatan laporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan transaksi sebenarnya, sehingga, antara administrasi dengan keuangan perusahaan memiliki data yang sama
- f. Dengan adanya sistem otorisasi atau ditandatangani terlebih dahulu setiap dilakukannya pengeluaran kas memperkecil kemungkinan adanya pengeluaran yang berlebihan, tetapi terbatas hanya pada kebutuhan tertentu saja

Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Menurut COSO dan Hery (2018:90) “Adapun komponen pengendalian internal menurut COSO (Commite of Sponsoring Organization) meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Untuk melaksanakan pengendalian lingkungan ini, diharuskan kepada pemimpin pemerintah daerah dan seluruh pegawai untuk menciptakan juga memelihara lingkungan organisasi pemerintah daerah yang menimbulkan perilaku positif untuk mendukung terselenggaranya pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

2. Penelian Resiko

Penilaian resiko sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko ini terdiri dari identifikasi dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Adanya kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi diperlukan oleh semua pihak dalam organisasi. Untuk ini maka informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sasaran tertentu dengan tepat waktu sehingga memungkinkan pemimpin entitas dalam pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengendalian yang menjadi tanggung jawab.

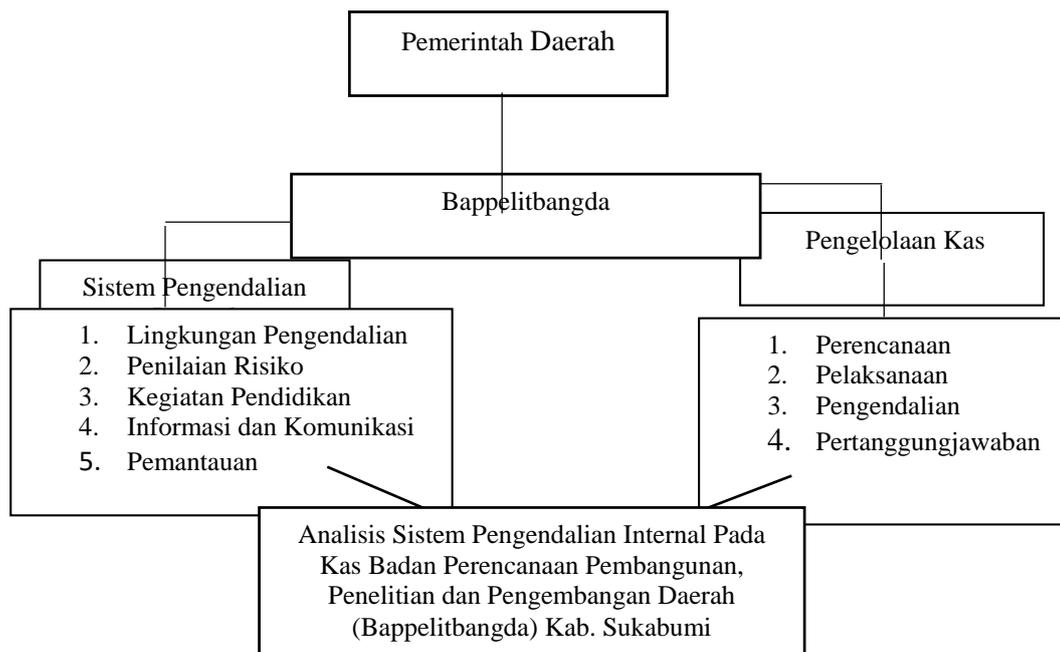
5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat melihat kualitas kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit rivi lainnya yang dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit atau rivi lainnya.

Kerangka Pemikiran

Pengelolaan kas yang baik, tentunya didukung dengan pelatihan pegawai yang berkualitas, dan kompeten dibidangnya dan dipenuhi dengan latar pendidikan yang cukup, sering mengikuti pelatihan dan pendidikan serta harus mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal ini sangat di perlukan guna untuk menunjang kemampuan untuk menyajikan pemisahan penerimaan serta pengeluaran kas yang berkualitas. Pentingnya sistem pengendalian dalam pengelolaan kas untuk menghindari timbulnya penyalah penyelewengan, penggelapan, penipuan, dan penghamburan terhadap kekayaan harta perusahaan atau peraktek lain yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kualitas pemisahan pemasukan serta pengeluaran kas dapat dicapai, tergantung dari faktor diantaranya pengendalian internal dan pengelolaan kas. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) akan mampu menghasilkan laporan pemisahan penerimaan serta pengeluaran kas yang berkualitas. Pengendalian internal memiliki peranan yang sangat integral karena merupakan penjaga bagi harta kekayaan institusi sebelum kecurangan atau penyalahgunaan kekayaan milik institusi untuk kepentingan pribadi (*Wachdog*).



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai analisis sistem pengendalian internal pada kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di kantor Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. Informan dari penelitian ini adalah kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, bendahara, sekretaris dan sub koordinator penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *Conclusion Drawing Verification* (kesimpulan dan verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi kini berganti nama menjadi Badan Perencanaa, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi. Ada tugas-tugas baru yang menjadi fokus Bappeda yaitu Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Nomenklatur baru ini mengacu pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perda No. 7 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 92 Tahun 2021 tentang SOTK Bappelitbangda. Litbang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan pemerintah, ekonomi dan pengembangan serta inovasi daerah. Sesuai aturan, badan ini mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada penulis mampu mendeskripsikan Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dapat di kelompokkan menjadi empat indikator yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, dan Informasi dan Komunikasi. Data Indikator Lingkungan Pengendalian difokuskan pada struktur organisasi yang jelas. Data Penilaian Resiko difokuskan pada perubahan dalam pencairan uang sekarang sudah menggunakan transfer dari bank bjb.

Prosedur Penerimaan Kas pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi

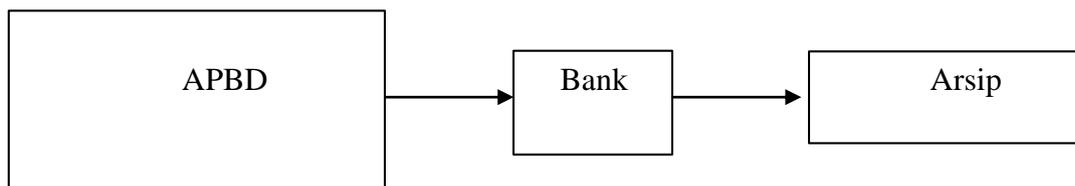
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan, dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

“Terkait sumber pendapatan daerah, dalam melaksanakan program, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi sumber penerimaan kas hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja”.

Adapun pengendalian internal yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi terhadap penerimaan kas yaitu dengan cara:

- a. Semua penerimaan kas yang berhubungan dengan penerimaan transfer dari kas daerah diterima oleh pemegang kas.
- b. Setiap saldo uang kas harus diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
- c. Hanya menyimpan sejumlah uang kas sehubungan dengan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- d. Pada waktu kas ditutup, kebenaran buku kas, bukti-bukti pendukung, serta saldo kas yang ada akan diperiksa.

Berikut adalah skema penerimaan kas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi:



Gambar 2 Prosedur Penerimaan Kas

Keterangan:

1. Sumber Pendapatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 bahwa pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi hanya berasal dari APBD.
2. Anggaran yang masuk disimpan di rekening kas umum daerah melalui Bank Jawa Barat.
3. Pengarsipan. Setelah semua selesai, kegiatan selanjutnya adalah pengarsipan yang bertujuan untuk menyimpan data. Dalam arsip data-data transaksi akan dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemeriksaan data-data penerimaan kas.

Prosedur Pengeluaran Kas Pada Bappelitbanda Kabupaten Sukabumi

Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai, atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. pengeluaran kas dapat berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang.

“Pengeluaran kas pada instansi ini digunakan untuk membayar biaya operasi dinas, baik pembayaran non tunai yang dipakai untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi, maupun untuk membayar biaya lain-lain seperti biaya kegiatan dan rapat”. Setiap pengeluaran kas harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang sebelum diotorisasikan.

Adapun pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh bukti pengeluaran kas bank ditandatangani oleh pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas sebagai bukti bahwa pengeluaran kas diketahui dan disetujui.
- b. Seluruh transaksi dibuatkan perincian secara menyeluruh.

- c. Melakukan cek silang oleh pemegang kas dan bidang keuangan untuk melihat apakah ada perbedaan dalam pencatatan.
- d. Semua cek harus dibayar sesuai nomor, yang umumnya ditetapkan oleh bank.
- e. Semua cek dan kwitansi yang keluar harus di pertanggung jawabkan oleh bagian keuangan.

Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada pegawai yang bersangkutan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi bahwa terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan, diantaranya:

- a. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi
Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari beberapa sistem yang dapat digunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau sebuah organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian internal merupakan kumpulan dari pengendalian sistem yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu sama lainnya. Terdapat beberapa prosedur pengendalian internal yang tidak dijalankan oleh instansi ini yang dapat dikaitkan sebagai kelemahan. Kelemahan sistem pengendalian internal pada kas yang ada dalam instansi ini yaitu tidak adanya pemisahan fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas. Responden mengatakan bahwa:

“Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi merupakan instansi yang rotasinya hanya untuk pengeluaran dan sumber dana juga hanya menerima dari APBD. Jadi tidak perlu adanya fungsi penerimaan kas lain pada dengan perusahaan yang sumbernya bisa dari penjualan, piutang, dll.

Hal ini bertentangan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang menjelaskan bahwa struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kelemahan lain yang terdapat pada instansi ini yaitu pengawasan terhadap pengendalian internal kas tidak berjalan dengan baik. Responden mengatakan bahwa:

“Kepala instansi kurang melakukan tinjauan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh fungsi pencatatan kas. Dan instansi tidak melakukan rekonsiliasi bank”.

Pimpinan hanya menyerahkan kepercayaan terhadap pegawainya untuk setiap transaksi, karena setiap transaksi pengeluaran uang kas harus melalui persetujuan yang telah dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan kas.

b. Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi

Meskipun terdapat beberapa kelemahan mengenai sistem pengendalian internal pada kas instansi ini dapat menutupi semua kelemahan agar tidak terjadinya kecurangan dan penyelewengan terhadap kas.

“Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi memiliki prosedur pengeluaran kas yang ketat, serta tahapan untuk mencairkan data sudah dilakukan secara rinci. Seperti: setiap permintaan pengeluaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap baru bisa diotorisasikan kepada yang berwenang. Jika terjadi ketidaklengkapan dokumen maka otomatis permintaan ditolak”.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap ada kekurangan pasti terdapat kelebihan. Seperti sistem pengendalian internal yang terdapat pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi memiliki kekurangan atas unsur-unsur pengendalian yang ada, namun dilihat dari prosedur pengeluaran kasnya sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada di dalam teori sistem pengendalian internal pada kas. Sehingga kemungkinan kecil seseorang untuk melakukan penyelewengan terhadap kas instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Kas Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi yaitu sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa analisis sistem pengendalian internal pada kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab.Sukabumi sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dalam prosedur penerimaan kasnya hal ini ditandai oleh:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan fungsi, tugas dan tanggungjawab dan wewenang masing-masing fungsi dan memenuhi setiap peraturan yang ada. Instansi ini sudah melakukan pemisahan tugas yang tepat. Hanya saja instansi

tidak memiliki fungsi untuk penerimaan kas, dikarenakan instansi hanya menerima sumber dana dari APBD dan langsung digunakan untuk setiap pengeluaran melalui tahapan-tahapan dalam melakukan pencairan dana sehingga tidak mudah untuk melakukan penyelewengan terhadap kas. Dilengkapi dengan pengawasan terhadap dokumen-dokumen transaksi pengeluaran kas.

- b. Kelengkapan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang resmi, dan setiap dokumen harus diotorisasikan dari fungsi lain yang terkait. Dengan demikian kemungkinan kecil terjadi penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut.
- c. Hasil dari analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai-pegawai yang terkait dengan sistem pengendalian internal pada kas untuk melihat kesesuaian terhadap unsur-unsur sistem pengendalian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitnagda) Kab.Sukabumi dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang ada pada PP No. 60 Tahun 2008 yang terdapat pada instansi ini sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis di Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Bappelitbangda maupun bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, yaitu:

1. Agar instansi dapat meningkatkan pengendalian internal pada kas yang lebih efektif agar harta yang dimiliki oleh instansi bisa tersimpan dengan aman agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan maka instansi dapat melakukan pengawasan serta evaluasi yang rutin atau secara berkala terhadap prosedur pengeluaran kas dalam instansi.
2. Diharapkan setiap pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rutinitas yang ditetapkan instansi agar setiap terjadinya transaksi pengeluaran kas langsung dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Serta penerimaan sumber dana dari APBN langsung digunakan untuk setiap pengeluaran dalam melakukan pencairan dana sehingga tidak mudah untuk melakukan penyelewengan terhadap kas.
3. Rekonsiliasi bank harus selalu dilaksanakan secara teratur untuk melihat kesesuaian pencatatan saldo kas yang ada di bank dengan catatan yang ada di buku kas umum instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmetshin, E. M., Vasilev, V. L., Mironov, D. S., Zatsarinnaya, E. I., Romanova, M. V., & Yumashev, A. V. (2018). Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research Studies Journal*, 21(2), 728–740.
- Albert. Go. (2020). Usulan Perancangan Metode 5S, (Seiri ,Seiton, Seiso, Seiketsu,Shitsuke) Pada Sumber Sejahtera Pratama Semarang. View Research Catalog Entry, For This Paper 5 (3) 248 - 253.s
- Ayu Ningtyas. (2018) SISTEM PENGELUARAN KAS. *JURNAL INFORMASI DAN PEMODELAN KIMIA*. . View Research Catalog Entry For This PaperJurnal Artide, 53 (9), 1-7.
- Damayanti, Irma. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang) View Research Catalog Entry For This Paper, Generic KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi. 12 (1) 95-102.
- Kaligis, Gabriella Margaretha Ilat, Ventje Pontoh, Winston. (2018). Fakultas, Akuntansi Ratulangi, Universitas Sam Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurnal Artide*15 View Research Catalog Entry, For This Paper. (5) 278-287.
- Kapoh, Octaviani M. Ilat, Ventje Warongan, Jessy D.L (2018) Analisis Penerapan Sistem Internal Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Journal Artide* View Research Catalog Entry, For This Paper 15 (5) 278-287.
- Mahmudin. (2018). Komponen pengendalian internal. *Jurnal Komponen Pengendalian Internal. Unikom _Ade Guru_Permana_13_BAB* 111.21.
- Masdiantini, Putu Riesty. (2018). Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* View Research Catalog Entry, For This Paper 123.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018
[Http//Www. Bpkd. Go.id, Id/Public/Upload](http://www.bpkd.go.id/public/upload).
- Mironov, Denis. (2018). Sergeevich Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research, Journal Studies*.Research Catalog Entry, For This Paper 21(2) 728-740.
- Mokoginta, M C. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada COSO

Terhadap Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Nanggrapratama Iner Nusantara). e-Jurnal.

Permatasari, Anita. (2022). Sistem Pengendalian Internal Kas pada Klinik Utama Vincentius Kristus Raja Surabaya BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF Research Catalog Entry, For This Paper 14 (1), 62-71.

Pertiwi, Dian (2018) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan JURNAL AKUNTANSI Journal artide Research Catalog Entry, For This Paper.

Potoh, Winston Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Journal artide Research Catalog Entry, For This Paper 5 (15). 278-287.

Pujiono, dodik slamet b.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen Artide Journal. 10 (1) 68-81.

Puspita, Novi. b.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen Artide Journal. 10 (1) 68-81.

Putri, Sri Rahayu Dwi. b.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen Artide Journal. 10 (1) 68-81.

<http://repository.stiedewantara.ac.id/1947/5/14.BAB III.pdf>

Rasmini, Ni Ketut. b.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen Artide Journal. 10 (1) 68-81.

Ratulangi, Universitas Sam. (2018). Fakultas, Akuntansi Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurnal Artide15 View Research Catalog Entry, For This Paper. (5) 278-287.

- Romanovo, Marina Viktoropna b2. (2018). Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research Studies Journal*, 21(2), 728–740.
- STIE INDONESIA. (2018). Bab iii metoda penelitian 3.1. *Journal Bab III Metoda Penelitian*, 1-9.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cetakan Ke-23. Hal 18 Bandung: ALFABETA. Warna: Biru Kuning.
- Sukarno, Hari. b.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara) *Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen Artide Journal*. 10 (1) 68-81.
- TEMA 11. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Journal of Materials Processing Technology*. 1 (1) 1-8.
- Vasilev, Vladimir Lvovich. b1 (2018). Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research Studies Journal*. 21(2), 728–740.
- Warongan, Jessy D.L. (2018) Analisis Penerapan Sistem Internal Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Artide *Journal View Research Catalog Entry, For This Paper* 15 (5) 278-287.
- Wawolangi, Jeanne Asteria. (2022). Sistem Pengendalian Internal Kas pada Klinik Utama Vincentius Kristus Raja Surabaya. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*. 14 (1), 62-71.
- Yumashev, Alexei Valerievich. b2 (2018). Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research Studies Journal*. 21(2), 728–740.
- Yuri Firdaus, Muhammad. (2018). Tinjauan Atas Pengelolaan Kas Pada Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Ii Jatiluhur, *Artide Journal Research Catalog Entry, For This Pape* 5 (3), 248-253.
- Zatsarinnaya, Elena Ivanovna. (2018). Internal control system in enterprise management: Analysis and interaction matrices. *European Research Studies Journal Artide Journal* 21(2),728-740.